BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada POLDA JABAR, Jalan Soekarno – Hatta No. 748 Bandung. Berikut adalah deskripsi mengenai POLDA JABAR yang dijadikan objek dalam penelitian.

3.1.1 Sejarah Singkat POLDA JABAR

Tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 sejalan dengan perjuangan merebut Irian Barat sebutan bagi kepolisian mengalami perubahan menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merangkap sebagai Panglima ANGKATAN Kepolisian dan untuk wilayah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Panglima Daerah Angkatan Kepolisian (PANGDAK) dan organisasinya disebut KOMDAK VIII Jawa Barat, tahun 1972 istilah organisasi KOMDAK VIII Jawa Barat Langlang Buana yang berkantor di jalan Braga No 135 Bandung.

Sejalan dengan integrasi ABRI pada tahun 1969 sebutan Angkatan Kepolisian berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan untuk daerah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL), yang kemudian berubah lagi dengan sebutan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) hingga saat ini.

Sejak bulan juni 1986 Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat pindah dari Jalan Braga No 135 ke Jalan Soekarno – Hatta No 748 Bandung sampai dengan saat ini. Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 1 juli 1946, selama 56 tahun keberadaannya Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengalami 23 kali pergantian pemimpin.

Sebagai kekuatan perjuangan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dianggap perlu Kepolisian Daerah Jawa Barat dikenal secara luas oleh lapisan masyarakat, tidak saja melalui pemahaman tugas pokok, peran, fungsi, struktur dan wilayah tugasnya. Secara sepintas Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai kondisi yang menguntungkan, baik dari segi geografis maupun dari segi kondi daerahnya.

Namun disisi lain terutama jika dilihat dari Kamtibmas mempunyai kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan Polda lain. Namun demikianKepolisian Derah Jawa Barat hingga saat ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali.

Kedudukan dan Tugas Pokok Polda Jabar dan Fungsi

Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Barat, disusun berdasarkan keputusan Kapolda Jabar No.Pol.Skep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penyempurnaan Pokok – pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.

Kedudukan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, adalah badan pelaksanaan utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan langsung dibawah Kapolri.

Tugas

Polda bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat serta tuga – tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hokum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.

Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok terebut sesuai kebijaksanaan Kapolri, maka fungsi polda sebagai berikut:

a. Pemberian layanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat – surat ijin atau keterangann sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

b. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan –satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
d. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan objek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan objek Vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, pengawalan penjagaan dan patroli lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana dan dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keaman wilayah perairan.
g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam

pembinaan keamanan dan ketertiban, dan terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.

h. Fungsi – fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanganni oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

3.1.2 Visi dan Misi POLDA JABAR

Visi POLDA JABAR

"Polda Jabar adalah jajaran Polda Jabar yang mampu menjadi pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang Professional dan Proporsional. Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jabar yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpecaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju''

Visi POLRI

"Terwujudnya postur polri yang professional, bermoral dan moderen sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpecaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum''

Misi POLDA JABAR

”Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jabar yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpecaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju’’

a. Memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebes dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikut sertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dilingkungan masing – masing.
c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
e. Menegakan hokum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hokum dan rasa keadilan.
f. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas malam jajaran Ditreskrim Polda Jabar.
g. Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.

Misi POLRI

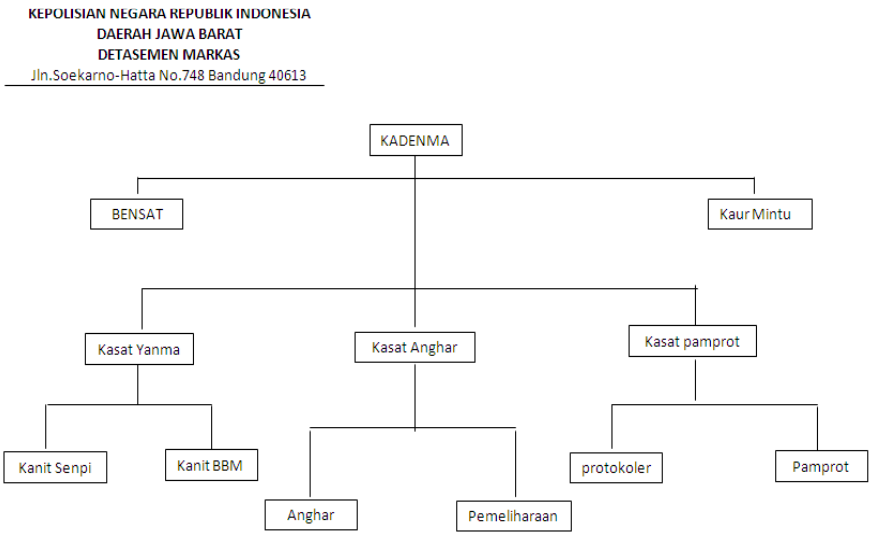
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakar terbebas dari gangguan fisik damaupun psikis.
b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *preemtif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding cityzenship*).
c. Menegakan hokum secara professional dan proporsional dengan menjungjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integrasi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Mengelola profesinalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana dan meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahtraan masyarakat.

3.1.3 Struktur Organisasi Unit Senjata Api POLDA JABAR

Berikut ini adalah struktur organisasi POLDA JABAR, dimana dalam struktur organisasi ini ditunjukkan adanya Unit Senjata Api POLDA JABAR,

pada bagian ini penulis akan melakukan penelitian guna mengembangakan sistem informasi peminjaman dan pengembalian senjata api pada POLDA JABAR berbasis *web*.



Gambar 3.1 *Struktur Organisasi Unit Senjata Api POLDA JABAR*

(Sumber : POLDA JABAR)

3.1.4 Deskripsi Tugas

A. Tugas Detasemen Markas (Denma) secara umum

1. Adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda.
2. Bertugas menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler dan penjagaan markas serta urusan dalam di lingkungan Mapolda.
3. DENMA terdiri dari:
   a. Satuan Pelayanan Markas disingkat Satyanma, bertugas menyelenggarakan apel, upacara, rapat/pertemuan, kebersihan dan tata tertib perkantoran, pengaturan pemondokan/perumahan termasuk

pelayanan pemakaman. Serta melayani anggota untuk pinjam pakai Senpi.

b. Satuan Angkutan dan Pemeliharaan disingkat Satanghar, bertugas menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemeliharaan materiil dan fasilitas.
c. Satuan Pengaman dan Protokol disingkat Satpamprot, bertugas menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan serta tugas-tugas protokol dan musik.

B. Unit Senpi

Pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab unit Senpi dipimpin oleh Kanit Senpi di bantu oleh Bamin Senpi yang berada di bawah Kasat Yanma di antaranya sebagai berikut :

a. Melakukan pengecekan langsung Senpi dan amunisi yang ada di gudang Senpi setiap hari sebelum serah terima piket.
b. Melakukan pendataan keluar masuk Senpi dan amunisi yang ada di gudang Denma Polda Jabar.
c. Merawat Senpi yang ada di gudang Denma Polda Jabar
d. Melayani anggota yang pinjam pakai Senpi Dinas yang telah memenuhi prosedur administrasinya.
e. Melayani anggota yang memperpanjang surat ijin memengang Senpi yang masa berlakunya sudah habis.
f. Menarik Senpi yang di pinjam pakai anggota bila mana anggota tersebut sudah tidak layak memegang senpi.

Untuk tugas dan tanggung jawab fungsi Senpi Denma Polda Jabar, maka Kanit Senpi bertanggung jawab langsung Kepada Kadenma.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengembangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian senjata api pada POLDA JABAR berbasis *web* adalah metode deskriptif dan metode penelitian tindakan (*action research*).

3.2.1 Desain Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang mempelajari berbagai aspek kualitatif dari kehidupan social yang mencakup ragam dimensi social dari tindakan (*action*) dan keadaan (*circumstances*) sehingga proses (*processes*), dan peristiwa (*events*) bagaimana dimengerti dan berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik- praktik social (*social practices*).

Selain itu juga metode kualitatif memperlakukan teori dan metode sebagai isu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, metode tidak hanya penting dalam menuntun bagaimana data dikumpulkan tetapi juga terhadap bagaimana data hendak dianalisis. Dengan kata lain, metode kualitatif tidak hanya merujuk pada logika yang mengatur prosedur (*the logic of procedure*) tetapi juga logika analisis (*the logic of analysis*).

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam pengamatan ini jenis dan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam pengembangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian senjata api pada POLDA JABAR berbasis web ini meliputi :

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

a. Pengamatan (Observasi)

   Yaitu cara mengumpulkan data dan informasi, dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian yaitu bagian tata usaha dan bagian sarana.

b. Wawancara (Interview)

   Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan tanya jawab secara lisan dengan kepala Unit Gudang Senjata POLDA JABAR.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang telah tersedia atau diberikan oleh pihak yang bersangkutan (pihak sekolah) kepada penulis.

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber-sumber kebanyakan dari materi sejenis dokumen yang berkenaan

dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan sejarah, tujuan, kegiatan dan struktur organisasi.

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan dan pengembangan sistem digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem sehingga sistem yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan perancangan terstruktur dimulai dari awal tahun 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (*tools*) dan teknik-teknik (*techniques*) yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas.

Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang komplek di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metodologi adalah kesatuan metode – metode, prosedur - prosedur pekerjaan, aturan – aturan dan postulat – postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Sedangkan metode adalah cara, teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu.

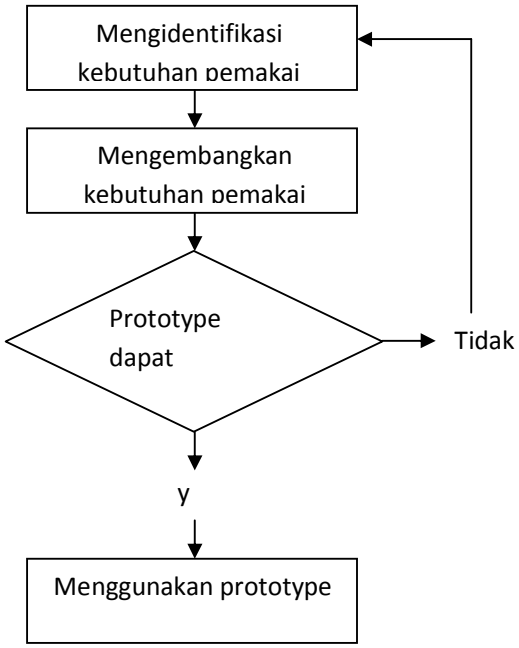
Mengenai metodologi yang digunakan dalam pembuatan laporan ini yaitu menggunakan metodologi prototype. Langkah – langkah dalam metode prototype yaitu :

1. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai

   Pada tahap ini analisis sistem akan melakukan studi kelayakan dan studi terhadap kebutuhan pemakai baik meliputi model interface, teknik prosedural maupun dalam teknologi yang akan diagunakan.

2. Pengembangan *prototype*

   Pada tahap kedua ini, analisis sistem bekerjasama dengan pemrograman yang mengembangkan *prototype* sistem untuk memperlihatkan kepada pemesan pemodelan sistem yang akan dibangun. Berikut gambar metode pengembangan *prototype* yang terdapat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.2 *Metode Pengembangan Prototype*

(Sumber : Jogiyanto 2003:88)

3. Menentukan *prototype*

   Apakah dapat diterima oleh pengguna atau pemakai. Analisis sistem pada tahap ini akan mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana pemodelan yang dibuatkannya dapat diterima oleh pemesan atau bahkan harus merombak secara keseluruhan.

4. Penggunaan *prototype*

   Pada tahap ini analisis sistem akan menyerahkan kepada pemrograman untuk mengimplementasikan pemodelan yang dibuat menjadi suatu sistem.

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan

Alat bantu analisis dan perancangan digunakan untuk memudahkan dalam perancangan sistem informasi pengolahan data guru dan karyawan yang dikembangkan penulis adalah :

1. *Flowmap*

Flow map atau sering disebut diagram sistem prosedur merupakan alat bantu yang banyak digunakan untuk menentukan dokumen yang teñibat, bagian yang membuat dokumen dan menerima dokumen, menentukan proses dan dokumen tersebut

2. Diagram Kontek

Diagram konteks merupakan gambaran umum dari sebuah system informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar system yang digunakan dalam analisis dan pengembangan sistem. Posisi diagram konteks dari sistem, ada dalam konteks yang berhubungan dengan lingkungan.

Diagram terdiri dari sebuah proses tunggal yang digambarkan seluruh sistem, dan menunjukan *dataflow* utama dari terminator.

3. *Data Flow Diagram*

DFD (*Data Flow Diagram*) digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misalnya lewat telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (misalnya *harddisk, Diskette, CD*, dan sebagainya).

Beberapa simbol yang digunakan di DFD antara lain :

a. Kesatuan Luar (*External Entity*)

Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima *input* dan menghasilkan *output* kepada lingkungan luarnya. Kesatuan luar (*external entity*) merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem.

b. Arus Data (*Data Flow*)

Arus data di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir diantara proses (*process*), simpanan data (*data store*) dan kesatuan luar (*external entity*). Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.

c. Proses (*Process*)

Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Suatu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol empat persegi panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul.

d. Simpanan Data (*Data Store*)

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa :

1) Suatu file atau database di sistem komputer
2) Suatu arsip atau catatan manual.
3) Suatu kotak tempat data di meja seseorang.
4) Suatu tabel acuan manual.
5) Suatu agenda atau buku.
6) Simpanan data di DFD dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang kedua ujungnya terbuka atau salah satu ujungnya tertutup.

4. Kamus Data

Kamus data atau *data dictionary* atau disebut juga dengan istilah *system data dictionary* adalah catalog fakta tentang data dan kebutuhan- kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada dalam DFD (*Data Flow Diagram*) dan hanya ditunjukkan arus datanya saja.

5. Perancangan Basis Data

a. Normalisasi

Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data relational yang tidak secara langsung berkaitan dengan modal data, tatapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Perancangan basis data di perlukan agar kita bisa memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses dan mudah dalam pemanipulasian (ubah, tambah, hapus) data.

b. Tabel Relasi

Tabel relasi adalah table relasi data base dengan struktur data hubungan dapat digambarkan dalam bentuk tabel. Kolom dari *table* menunjukan atribut dari file. Atribut ini menunjukan item data atau *field.*

3.2.4 Pengujian Software

Pentingnya pegujian perangkat lunak dan implikasinya yang mengacu pada kualitas perangkat lunak tidak dapat terlalu ditekankan seperti yang dikatakan oleh Jogiyanto (2003: 78) :

”Perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian *Black Box* sebagai metode pengujian yang akan digunakan dalam pengujian perangkat lunak yang dihasilkan.

Pengujian *Black Box* berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak, meskipun didesain untuk mengungkap kesalahan, pengujian *Black Box* digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi perangkat lunak adalah operasional, bahwa input diterima dengan baik dan output dihasilkan dengan tepat, dan integritas informasi eksternal (seperti *file* data) dipelihara.